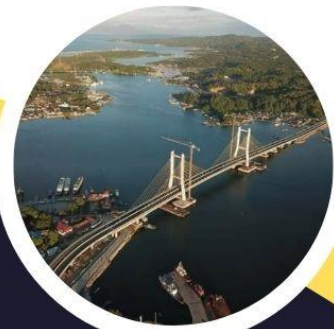


RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan	41
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	49
4.2 Prioritas Perangkat Daerah	49
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan	50
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2020 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 – Berdasarkan Renstra 2019 - 2024)	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2020 (<i>Berdasarkan Renstra 2019 – 2024</i>)	11
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana strategis Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 (Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan – Berdasarkan Perubahan Renstra 2019 - 2024)	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	23
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur	30
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024	43
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

- Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD dan RKPD;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil; Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... tahun ... tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
 21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/48/KPTS/013/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-substansi Serta Tugas Koordinator dan sub-Koordinator di lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan

b. Tujuan

Penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan penyusunan rencana anggaran serta evaluasi program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat : (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra; (2) Analisis Kinerja Pelayanan; (3) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; (4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD; (5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; (2) Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan, mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur; (3) Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : Prioritas perangkat daerah yang mendukung Prioritas Provinsi dan Prioritas Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah melalui penelusuran terhadap program / kegiatan yang tidak memenuhi target, yang memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sehingga dapat diketahui faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari program/kegiatan yang direncanakan. Selain itu dapat diketahui dampak yang timbul terhadap capaian kinerja yang pada akhirnya dapat diambil tindakan / kebijakan untuk mengatasi faktor penyebabnya.

Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2023 didasarkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 - 2024 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terbagi dalam 3 periode sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan
Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2019
(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 – Berdasarkan Renstra 2014 – 2019)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
										K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)					
1	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Lama)	100	100	-	-	-	-	-	-	
		1	3	03	1	19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (kegiatan lama)	100	100	-	-	-	-	-	-	
		1	3	03	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program lama)	100	100	-	-	-	-	-	-	
		1	3	03	2	12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama)	52	30	-	-	-	-	-	-	
		1	3	03	2	31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama)	36	20	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
		1	3	03	7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (program lama)	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	7	1	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah konsultasi	4.100	2.000	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	7	2	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/ pendidikan/pelatihan	173	65	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah (Program Lama)	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan (kegiatan lama)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	32	12	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran (kegiatan lama)	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	32	12	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data (kegiatan lama)	Jumlah update database Perangkat Daerah	8	4	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)					
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)				
				K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	30	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Program Lama)	Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan	100	100	-	-	-	-	-	-	
	1	3	03	31	Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan (Program Lama)	Persentase kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	-	-	-	-	-	-	
	1	3	03	31	1	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (kegiatan lama)	Jumlah notulen rapat	20	12	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	2	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan jasa konstruksi (kegiatan lama)	Jumlah paket lelang yang dilelang melalui LPSE	6.700	4.100	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	2	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan jasa konstruksi (kegiatan lama)	Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang /jasa	6	2	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	3	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis (kegiatan lama)	Jumlah laporan pelaporan program strategis	10	4	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik (kegiatan lama)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	297	192	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	5	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan lama)	Jumlah paket yang selesai diproses	900	9000	-	-	-	-	-	-
1	3	03	31	6	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa (kegiatan lama)	Jumlah peserta Bimtek dan ujian pengadaan barang/jasa	35	35	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)	
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
		1	3	03	31	7	Advokasi Pengadaan Barang/Jasa / Jasa (kegiatan lama)	Jumlah advokasi PBJ	8	8	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	84		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan (Program Lama)	Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	1	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim (Kegiatan Lama)	Jumlah peserta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa	400	160	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	7	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim (Kegiatan Lama)	Jumlah pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov. Jatim	5	4	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	11	Penyusunan Standar Satuan Harga (kegiatan lama)	Jumlah rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB	13	7	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan
Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020
(Berdasarkan Renstra 2019 – 2024)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
								K	K	K	K				
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
Meningkatnya Kebijakan dibidang Pembangunan	1	3	03	01	Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	82,5	-	82,2	80,79	98,16	-	-	-	
						2. Persentase Indikator Program yang tercapai	100	-	100	100	100	-	-	-	
						3. Persentase realisasi anggaran	97	-	95	95	97,93	-	-	-	
						4. Indeks Profesionalitas ASN	88	-	88	83	94,31	-	-	-	
	3	3	03	01	008	Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	30	-	30	30	100	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
				K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
		1 3 03 19	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Jumlah rumusan kebijakan	15	-	3	3	100	-	-	-
		1 3 03 19 001	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	Jumlah modul kebijakan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	18	-	3	3	2020	-	-	-
		1 3 03 19 002	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur sumber daya air	Jumlah modul kebijakan sumber daya air	13	-	2	2	100	-	-	-
		1 3 03 19 003	Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi	Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi	14	-	2	2	100	-	-	-
		1 3 03 20	Program sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kebinamrgaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan kebijakan	-	-	2	2	100	-	-	-
		1 3 03 20 001	Penyelenggaraan administrasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sinergitas proyek strategis	Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategis dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha	25	-	3	3	100	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
								K	K	K	K					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)						
		1	3	03	20	002	Penyelenggaraan administrasi pembangunna infrastruktur kebinamargaan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamrgaan	20	-	2	2	100	-	-	-
		1	3	03	31	003	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perhubungan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan	20	-	2	2	100	-	-	-
		1	3	03	21		Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan	8	-	8	8	100	-	-	-
		1	3	03	21	001	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga	Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	20	-	4	4	100	-	-	-
		1	3	03	21	002	Evaluasi dan Pengendalian Realisasi	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	23	-	4	4	100	-	-	-

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan
Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2022

(Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan – Berdasarkan Perubahan Renstra 2019 - 2024)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
										K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)					
Meningkatnya Kebijakan dibidang Pembangunan						2. Persentase Indikator Program yang tercapai	100	-	100	100	100	100	100	100	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						3. Persentase realisasi anggaran	97	-							
						4. Indeks Profesionalitas ASN	67	-							
						Keg Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	34	-						
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	36	-							

No	Sasaran	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
					K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
							K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	4	-						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	4	-						
			Sub Kegiatan Baru Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA	4	-						
			Sub Kegiatan Baru Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	4	-						
			Sub Kegiatan Baru Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja	20	-						
			Sub Kegiatan Baru Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi renja	16	-						
			Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	48	-						
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	-						
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	48	-						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
						K	K					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	48	-						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD	8	-						
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan tanggapan atas LHP	4	-						
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	4	-						
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan BMD	48	-						
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	16	-						
			Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian PD	48	-						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan data pegawai	48	-						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
				K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan SKP	48	-						
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4	-						
			Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	20	-						
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	4	-						
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	4	-						
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	4	-						
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	4	-						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
						K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Jumlah daftar arsip aktif 2. Jumlah daftar arsip inaktif 3. Jumlah daftar arsip vital	1. 4 2. 4 3. 4	-					
			Keg Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	4	-					
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	4	-					
			Keg Peny. Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	-					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman dokumen	4	-					
			Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12	-					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
						K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah jasa	48	-					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	-					
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah terpeliharanya aset tak berwujud	24	-					
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (PROGRAM BARU)	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	34	-					
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (kegiatan baru)	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	12	-					
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Sub Kegiatan Baru)	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	12	-					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
						K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Sub Kegiatan Baru)	jumlah dokumen modul kebijaka pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	12	-					
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Sub Kegiatan Baru)	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	10	-					
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (kegiatan baru)	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	9	-					
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (sub Kegiatan Baru)	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	10	-					
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (sub Kegiatan Baru)	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	10	-					
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (sub Kegiatan Baru)	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	10	-					

Berdasarkan tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020, yaitu :

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020

Merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020 yang berdasarkan pada Renstra 2014 - 2019

Analisis kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan 7 Program dengan 21 Kegiatan sebesar **96,02 %** yaitu **Rp. 29.933.370.593,-** dari Pagu Anggaran **Rp. 31.441.017.000**

2. Tabel 2.2 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020

Merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020 yang berdasarkan pada Renstra 2019 – 2024

Pada Tahun 2020 terdapat 4 program dengan 9 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 dengan total pagu sebesar **Rp. 27.846.180.718,-** didapatkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.458.96.431,-** atau terealisasi **95,02 %** yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar **4,98 %**.

2. Tabel 2.3 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022

Merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2021 yang berdasarkan pada Renstra Perubahan 2019 – 2024

Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan, tidak terisi hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan. Untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2019-2024 sedangkan

nomenklatur program kegiatan Tahun 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Pada Tahun 2022 terdapat 2 program dengan 10 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 dengan total pagu sebesar **Rp. 22.541.452.000,-** didapatkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 21.692.960.909,-** atau terealisasi **96,24 %** yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar **3,76 %**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2022 kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi dari 2 program dengan 10 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 dengan total pagu sebesar Rp. 22.541.452.000,- didapatkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 21.692.960.909,-** atau terealisasi **96,24%** yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar **3,7 %**. Adapun hasil/keluaran kinerja akan diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

(T-C.30 Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Sesuai dengan Perubahan Renstra 2019 – 2024)

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	SPM/ Std. Nas.	IKK	MCP	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	V	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pembangunan	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Adm. Pembangunan	-	V	-	-	-	-	-	82,3	81,2	81,3	81,4	81,2	80,78	80,79	81,43	81,3	81,4	Menjadi Sasaran sesuai Perubahan Renstra 2019 -2024
5	Penetapan ASB	-	-	-	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	
6	Implementasi ASB	-	-	-	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi bertugas menyiapkan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang antara lain :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah kurang optimal.
2. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) kurang optimal
3. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan kurang optimal.
4. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur kurang optimal
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) kurang optimal.
6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan kurang optimal.
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah kurang optimal
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur kurang optimal

9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan kurang optimal

Dalam melaksanakan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan menghadapi Permasalahan dan mencoba mengatasinya. Berikut Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah secara spesifik sesuai dengan Sub Kejadiannya :

1. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

Permasalahanan yang dihadapi pad sub kegiatan ini adalah :

- a. Data realisasi keuangan, fisik dan permasalahan pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur terupdate setiap bulan belum realtime.
- b. Masih adanya realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah tidak sesuai dengan target yang direncanakan.
- c. Data realisasi keuangan, fisik dan permasalahan pelaksanaan APBD di Kabupaten – Kota Se-Jawa Timur belum terupdate tepat waktu setiap bulan
- d. Belum ada aplikasi pengganti Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang telah dinonaktifkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)

Dari Permasalahan diatas, dilakukan upaya penyelesaiannya dengan langkah sebagai berikut :

Pada poin a, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya diantaranya:

1. Pada awal tahun Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Pelatihan aplikasi SMEP yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi untuk meng-entry aplikasi SMEP dan menentukan target –

target realisasi setiap bulannya selama tahun berjalan

2. Berkoordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera meng-entry data realisasi keuangan, fisik dan permasalahan pelaksanaan APBD pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Pemprov. Jatim secara tepat waktu
3. Melaksanakan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan dan fisik beserta permasalahan setiap awal bulan
4. Menyusun laporan ke Gubernur Jawa Timur terkait progress realisasi keuangan dan fisik beserta permasalahan Perangkat Daerah

Pada poin b, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya yaitu dengan menerbitkan Surat Evaluasi Gubernur Jawa Timur terkait percepatan realisasi keuangan dan fisik kepada Perangkat Daerah yang realisasinya rendah

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan pada poin c, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Berkoordinasi secara intensif dengan Pejabat Penghubung di Kabupaten / Kota agar segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan terkait realisasi APBD Kabupaten / Kota
3. Menyusun laporan ke Gubernur Jawa Timur terkait progress realisasi keuangan dan fisik Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur.

Untuk mengatasi permasalahan pada poin d, Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2022 akan menginisiasi aplikasi terintegrasi pelaporan realisasi anggaran Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur.

2. **Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN.** Pada Sub Kegiatan ini menghadapi hambatan adalah belum terupdate-nya tepat waktu penyampaian realisasi keuangan dan fisik beserta permasalahan pada pelaksanaan APBN di Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur. Permasalahan tersebut

penyelesaiannya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah yang mengelola APBN dan Kabupaten / Kota dalam percepatan realisasi APBN serta pelaporannya
- b) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan realisasi APBN
- c) Melaksanakan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Perangkat Daerah yang mengelola APBN dan Kabupaten / Kota terkait percepatan realisasi APBN
- d) Monitoring dan evaluasi realisasi APBN

3. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaporkan progress pembangunan di wilayahnya baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek lainnya kepada Gubernur secara berkala. Hal tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan pembangunan ke Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan aplikasi SINFRA untuk monitoring dan evaluasi pembangunan

4. Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Proses monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pembangunan daerah kerap kali terhambat akibat data yang dimiliki masing-masing instansi tidak menggunakan format yang seragam, data yang dimaksud yaitu: (1) Rumah Layak Huni; (2) Akses Sanitasi Layak; (3) Akses Sanitasi Aman; (4) Buang Air Besar Sembarangan (Babs); (5) Sanitasi

Penanganan Sampah Perkotaan; (6) Akses Air Minum Layak; (7) Akses Air Minum Jaringan Perpipaan; (8) Akses Air Minum Jaringan Bukan Perpipaan

b. Dokumen pengajuan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk Penanggulangan Kerusakan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur yang diusulkan oleh Perangkat Daerah tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan Peraturan sehingga kerap kali menghambat proses. Dalam mengatasi permasalahan poin a, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan bentuk data capaian kinerja pembangunan yang ada pada sektor terkait dan diintegrasikan dalam satu bentuk format yang disepakati bersama.
2. Melakukan konsolidasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk keseragaman bentuk dan tolak ukur.

Selanjutnya upaya penyelesaian pada poin b adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi pengusul untuk melengkapi dokumen kelengkapan administrasi yang sesuai dengan Peraturan sebelum tanggal yang telah ditentukan agar proses pencairan Dana BTT masih dalam masa Status Tanggap Darurat

5. Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki permasalahan yang dihadapi adalah belum terintegrasinya pelaporan pembangunan daerah. Tahun 2022, Biro Administrasi pembangunan melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan koordinasi baik dengan instansi terkait dan Kabupaten / Kota serta monitoring dan evaluasi terkait penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

6. Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah, memiliki permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya Perangkat Daerah yang belum memiliki pemahaman tentang standar Belanja yang meliputi Standard Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standard Belanja

(ASB) serta proses masing-masing penyusunan standar belanja dimaksud, dan persyaratan saat akan diinputkan ke SIPD.

- b. Belum adanya pemahaman perangkat daerah tentang batas waktu (timeline) penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang SBU, HSPK dan ASB.

Dalam mengatasi permasalahan poin a, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya dengan menyelenggarakan sosialisasi terhadap seluruh perangkat daerah terkait dengan definisi dan mekanisme proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang SBU, HSPK dan ASB.

Sedangkan pada poin b, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sosialisasi terhadap seluruh perangkat Daerah terkait batas waktu (timeline) penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang SBU, ASB, HSPK
2. Menginfokan batas waktu (time line) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang SBU, HSPK dan ASB kepada Perangkat Daerah terkait melalui Surat Edaran Gubernur
3. Melakukan desk dan pendampingan terkait mekanisme penyusunan ASB terhadap Perangkat Daerah yang mengusulkan ASB

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Sby	Persentaase Indikator Program yang tercapai	100%	14.019.745.007	XXX01	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Sby	Persentaase Indikator Program yang tercapai	100%	9.836.198.000
			Persentase realisasi anggaran	96 %					Persentase realisasi anggaran	97%	
			Indeks Profesional ASN	88					Indeks Profesional ASN	66	
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Keuangan Daerah	Sby	1. jumlah dokumen perencanaan anggaran 2. jumlah dokumen pelaporan	1. 8 2. 4	1.691.346.473	XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Keuangan Daerah	Sby	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13	183.660.138
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11	41.990.275	XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11	14.510.000
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	jumlah dokumen RKA	1	8.475.631	XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	2	6.045.600

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0 1101 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	8.475.631	XXX0 1101 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	2	4.881.900
XXX0 1101 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA	1	8.475.631	XXX0 1101 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	2	6.536.400
XXX0 1101 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	8.475.631	XXX0 1101 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	2	6.536.400
XXX0 1101 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sby	jumlah dokumen capaian kinerja	5	1.607.701.537	XXX0 1101 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sby	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	115.840.000
XXX0 1101 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	jumlah dokumen evaluasi renja	4	7.752.135	XXX0 1101 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	7.958.400

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX 011 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sby	jumlah dokumen administrasi keuangan	12	8.523.012.845	XXX 011 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sby	jumlah dokumen administrasi keuangan	12	7.698.965.912
XXX0 1102 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sby	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	8.357.311.365	XXX0 1102 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sby	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	7.009.610.640
XXX0 1102 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	117.313.631	XXX0 1102 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12	25.693.800
XXX0 1102 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12	14.853.399	XXX0 1102 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	7.839.000
XXX0 1102 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	jumlah laporan keuangan SKPD	2	13.895.524	XXX0 1102 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	8.506.100
XXX0 1102 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	jumlah laporan tanggapan atas LHP	1	15.311.705	XXX0 1102 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	6.554.700

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0 1102 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	jumlah laporan prognosis	1	4.327.221	XXX0 1102 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	13	4.928.400
XXX 011 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan BMD	12	6.500.460	XXX 011 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan BMD	4	4.798.438
XXX0 1103 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	12	6.500.460	XXX0 1103 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	4.798.438
XXX 011 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan kepegawaian PD	25	457.509.130	XXX 011 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan kepegawaian PD	12	246.855.000
XXX0 1105 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	sby	jumlah laporan data pegawai	12	36.008.641	XXX0 1105 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	25.950.000
XXX0 1105 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	jumlah laporan SKP	12	79.755.113	XXX0 1105 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	34.820.000
XXX0 1105 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	sby	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1	341.745.376	XXX0 1105 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	sby	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	61	186.085.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX 011 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5	2.403.846.387	XXX 011 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sby	j jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1	1.809.262.000
XXX0 1106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sby	jumlah paket pengadaan	1	837.385.494	XXX0 1106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sby	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	536.500.000
XXX0 1106 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sby	jumlah paket pengadaan	1	556.217.636	XXX0 1106 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sby	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	530.950.000
XXX0 1106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	sby	jumlah paket pengadaan	1	273.256.443	XXX0 1106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	sby	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	253.260.000
XXX0 1106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sby	jumlah laporan koordinasi	1	728.183.821	XXX0 1106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sby	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	478.552.000
XXX0 1106 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	sby	1. daftar arsip aktif 2. jumlah daftar inaktif 3. jumlah daftar arsip vital	1. 1 2. 1 3. 1	8.802.993	XXX0 1106 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	sby	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX 011 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sby	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	1	491.482.079	XXX 011 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sby	jumlah pengadaan barang milik daerah prasarana	15	20.000.000
XXX0 1107 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	sby	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1	491.482.079	XXX0 1107 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	sby	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	15	20.000.000
XXX 011 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	55.018.704	XXX 011 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	jumlah jasa penunjang urusan	1	25.000.000
XXX0 1108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sby	Jumlah pengiriman dokumen	1	55.018.704	XXX0 1108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sby	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	25.000.000
XXX 011 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	3	391.028.930	XXX 011 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	jumlah paket pemeliharaan BMD	3	316.518.000
XXX0 1109 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sby	Jumlah jasa	16	124.518.330	XXX0 1109 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sby	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	34	98.480.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0 1109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sby	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara	12	46.435.786	XXX0 1109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sby	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59	88.038.000
XXX0 1109 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	sby	jumlah paket aset tak berwujud yang dipelihara	6	220.074.814	XXX0 1109 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	sby	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2	130.000.000
401 08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sby	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan	14 dok	16.408.388.993	401 08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sby	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan	14 dok	5.840.826.000
401 081 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11 dok	11.069.469.108	401 081 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11 dok	3.675.190.000
4010 8101 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	2.295.353.636	4010 8101 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	748.934.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	jumlah dokumen modul kebijaka pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	2.399.536.507	4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	677.486.000
4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan	3	6.374.578.964	4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	3	2.248.770.000
40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	3	5.338.919.886	40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	3	2.165.636.000
4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	3	1.422.527.911	4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	3	317.905.000
4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	3	1.681.193.076	4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	3	465.666.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010 8102 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	2.235.198.899	4010 8102 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan	3	1.382.065.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) berdasarkan asa demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Namun pada Tahun 2023, tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari eksternal (masyarakat, LSM, asosiasi dan sebagainya).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Kerja yang akan dilakukan dalam periode 2022, perlu adanya tinjauan terhadap kebijakan nasional yang berlaku sehingga hasil rumusan dapat mendukung kebijakan nasional tersebut. Rencana kerja daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN) yang dijelaskan lebih detail pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam kurun waktu 5 tahunan melalui Peraturan Presiden. Secara umum, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas didorong oleh kemajuan perekonomian serta persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat
- 2) Membuka dan menyerbarluaskan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan lapangan kerja
- 4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
- 5) Menumbuhkembangkan daya saing daerah

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, adalah :

Tema RKP Tahun 2022 adalah Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural

Sedangkan agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, maka dukungan Biro Administrasi Pembangunan sangatlah penting dalam menyiapkan perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan

Renja Biro Administrasi Pembangunan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024,

dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Maka tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Biro Administrasi Pembangunan 2019-2024 dan disesuaikan dengan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2019-2024, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“ Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan ”

Indikator Tujuan :

Persentase Kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan

Sasaran :

Meningkatnya Kebijakan bidang pembangunan

Indikator Sasaran :

1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan
2. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti
3. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berjumlah 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan Belanja Langsung senilai Rp. 15.855.636.000 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Kesekretariatan Daerah								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Indikator Program yang tercapai • Persentase realisasi Anggaran • Indeks Profesionalitas ASN 	Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 97 • 66 	9.836.198.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 96 • 66 	14.238.594.854
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Surabaya	13	183.660.138	APBD		1.9 2.4	1.717.748.587
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	11	14.510.000	APBD		11	42.645.748
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Surabaya	2	6.045.600	APBD		1	8.607.937
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Surabaya	2	4.900.000	APBD		1	8.607.937
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Surabaya	2	6.550.000	APBD		1	8.607.937

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	Surabaya	2	6.550.000	APBD		1	8.607.937
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Surabaya	8	95.960.000	APBD		5	1.632.797.945
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	surabaya	4	8.000.000	APBD		4	7.873.147
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	Surabaya	12	7.448.365.000	APBD		12	8.656.058.065
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Surabaya	12	7.373.840.000	APBD		12	8.487.769.965
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi	Surabaya	12	39.195.000	APBD		12	119.144.910
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Surabaya	12	14.170.000	APBD		12	15.085.263

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Surabaya	2	8.540.000	APBD		2	14.112.435
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	Surabaya	1	8.250.000	APBD		1	15.550.723
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Surabaya	13	4.370.000	APBD		1	4.394.769
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan BMD	Surabaya	4	6.050.000	APBD		12	6.601.933
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	4	6.050.000	APBD		4	6.601.933
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan kepegawaian PD	Surabaya	12	246.855.000	APBD		12	464.650.901
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi	Surabaya	12	25.950.000	APBD		12	36.570.740
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Surabaya	12	34.820.000	APBD		12	81.000.099

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Surabaya	61	186.085.000	APBD		1	347.080.061
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Surabaya	1	1.829.262.000	APBD		5	2.441.370.708
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Surabaya	1	536.500.000	APBD		1	850.457.179
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Surabaya	1	530.950.000	APBD		1	564.900.258
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Surabaya	1	253.260.000	APBD		1	277.522.008
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Surabaya	12	498.552.000	APBD		1	739.550.855
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Surabaya	1	10.000.000	APBD		1	8.940.408
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	Surabaya	15	0	APBD		1	55.877.552
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Surabaya	15	0	APBD		1	55.877.552
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	1	25.000.000	APBD		1	55.018.704

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			1	2	3	4		5	6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Surabaya	1	25.000.000	APBD		1	55.018.704
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Surabaya	3	316.000.000	APBD		3	397.132.937
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Surabaya	34	94.480.000	APBD		16	126.462.076
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Surabaya	59	88.038.000	APBD		12	47.160.654
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Jatim	2	130.000.000	APBD		6	223.510.208
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan	Jatim	14	5.840.826.000	APBD		14	16.683.166.146
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	Jatim	11	3.675.190.000	APBD		12	11.069.469

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Jatim	4	2.471.758.325	APBD		4	2.295.353.636
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Jatim	4	2.583.947.957	APBD		4	2.399.536.507
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah pembangunan wilayah 1, 2, 3	Jatim	3	2.248.770.000	APBD		4	6.374.578.964
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jatim	3	2.165.636.000	APBD		3	5.338.919.886
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	Jatim	3	317.905.000	APBD		3	1.422.527.911
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Jatim	3	465.666.000	APBD		3	1.681.193.076
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jatim	3	1.382.065.000	APBD		3	2.235.198.899
	TOTAL				15.855.636.000				30.921.761.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pembinaan umum di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama pemerintah provinsi dengan badan usaha. Dengan begitu, Biro Administrasi Pembangunan menunjang Misi ke – 3 pada RPJMD 2019 – 2024 yaitu : Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

-

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Tabel Prioritas Perangkat Daerah 2023

Prioritas PD	Nawa Bhakti	Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengendalian Administrasi Pembangunan	8	40108	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	784.934.000	
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	677.486.000	
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2.248.770.000	
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	317.905.000	
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	465.666.000	
					Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.382.065.000	

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul

- KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indicator kinerja program (outcome) / Kegiatan (output) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Tahun 2023, terdapat 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp. 15.855.636.000 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Tahun 2024, terdapat 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp. 30.921.761.000 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2023 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2023, Renja Biro Administrasi Pembangunan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya manusia yang ada.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Biro Administrasi Pembangunan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Surabaya, 1 September 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si
Reboina Utama Muda
NIP. 19660729 199703 1 001